

FLYPAPER EFFECT PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2013 – 2017

Kevin Firnandyas Nusa Pradana ¹⁾

Suharno ²⁾

Bambang Widarno ³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ kevinpradana55@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of PAD and DAU on regional spending and determine whether there is a flypaper effect on PAD and DAU. This research was conducted at the local government of Surakarta City. The type of data used is quantitative data. The data source used is secondary data. Data collection techniques in this study using documentation. Data analysis techniques using multiple linear analysis and flypaper effect test. The results of this study indicate partially the PAD significance value of $0.037 < 0.05$, the PAD has a significant effect on the regional expenditure allocation. The significance value of the DAU is $0.062 > 0.05$, so the DAU has no significant effect on the allocation of regional expenditure. PAD and DAU simultaneously have a significant effect on regional expenditure allocations with a significance value of $0.006 < 0.05$. The PAD coefficient value is 1.032 and the DAU coefficient value is 0.887. There was no flypaper effect on the Surakarta city government finances in 2013 - 2017, because the PAD coefficient value was greater than the DAU coefficient value.

Keywords: *flypaper effect, local revenue, general allocation funds, regional expenditures, local government.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi daerah yaitu supaya pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Implikasi dari kebijakan tersebut adalah dengan disahkannya UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adanya pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah disebabkan oleh adanya kesenjangan fiskal tiap-tiap daerah. Kesenjangan fiskal sendiri terjadi karena adanya perbedaan sumber pendapatan ekonomi dari masing-masing daerah. Oleh karena itu dilakukanlah transfer oleh pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk dana perimbangan.

Dana Perimbangan adalah dana yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Bratakusumah, 2003). Dana perimbangan sendiri

terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemberian dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah ini ditujukan untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menargetkan bisa lepas dari ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam hal penganggaran pada tahun 2020 mendatang (Solopos.com: 2018). Dengan catatan bahwa struktur APBD kota Surakarta dapat menyangga seluruh kebutuhan anggaran belanja, dan juga saat ini pemerintah kota terus menggenjot potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor guna memperkuat APBD. Menurut Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Surakarta bahwa pemerintah kota tidak dapat terus mengandalkan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi. Beliau juga berpendapat bahwa struktur APBD Kota Surakarta belum sehat karena anggaran belanja masih lebih besar dibandingkan pendapatan. Maka dari itu, Pemerintah Kota Surakarta secara bertahap terus mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) supaya memaksimalkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan PAD dan memenuhi kebutuhan dalam belanja APBD. Kasus di atas telah mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Surakarta masih bergantung dengan adanya dana transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Flypaper effect merupakan perbedaan respon belanja daerah atas sumber pendapatan daerah. Terjadi *flypaper effect* apabila pemerintah daerah merespon bahwa belanja daerah lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri yang diprosikan dengan PAD.

Penelitian Susanti Eka Wahyuni dan Indrian Supheni (2017) dengan judul “*Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012 - 2016” mengatakan bahwa PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Variabel lain yaitu dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Juga terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah di Pemerintah Kabupaten Nganjuk periode 2012 - 2016.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tahun penelitian dan objek yang diteliti dengan ruang lingkup yang lebih kecil yaitu Pemerintah Kota Surakarta. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah serta mengetahui apakah terjadi *flypaper effect* terhadap PAD dan DAU.

LANDASAN TEORI

1. Teori Agensi

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pihak yang memberi kewenangan sebagai prinsipal dan pihak yang diberi kewenangan sebagai agen. Teori agensi juga menjelaskan hubungan keagenan vertikal antar eksekutif. Hubungan keagenan dalam penelitian ini adalah pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi amanah (*agent*) merupakan pihak yang dikontrak oleh prinsipal untuk bekerja demi kepentingan prinsipal.

2. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pusat ke pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah dalam NKRI. Menurut UU No. 32 tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya daerah kabupaten, sekarang ini desa diberikan tanggung jawab untuk

mengatur sendiri urusan kebutuhan desa tersebut. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diberikan oleh pemerintahan kabupaten. Daerah otonom harus mampu untuk mengelola dan mengatur keuangan daerahnya sendiri. Keuangan daerah diartikan adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan perundang-undangan yang merupakan sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran. Menurut UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Secara rata-rata nasional, PAD hanya memberikan kontribusi 12-15% dari total penerimaan daerah, sedangkan yang kurang lebih 70% masih menggantungkan sumbangan dari bantuan pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bertujuan melakukan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran Halim (2002: 68). Menurut Undang-Undang No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jadi belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah tersebut.

3. *Flypaper Effect*

Maimunah (2006) menyatakan bahwa *flypaper effect* disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja daerah lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri yang diprosikan dengan PAD. Menurut Penthury (2011) untuk mengetahui apakah terjadi *flypaper effect* atau tidak di suatu daerah, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Dengan melihat pengaruh dari PAD. Jika PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi *flypaper effect*.
- b. Melihat nilai koefisien dari variabel independen, yaitu DAU dan PAD. Jika nilai koefisien yang dimiliki oleh PAD lebih besar dari nilai koefisien yang dimiliki oleh DAU maka dapat dikatakan tidak terjadi *flypaper effect*. Sedangkan sebaliknya jika nilai koefisien yang dimiliki oleh salah satu yang berasal dari transfer daerah yaitu DAU lebih besar daripada nilai koefisien dari PAD maka dapat dikatakan telah terjadi *flypaper effect*.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Menurut UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan

desentralisasi. Hasil penelitian terdahulu Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah (Susanti Eka Wahyuni, Indrian Supheni, 2017). Menurut Rihfenti (2017) dalam penelitiannya variabel pendapatan asli daerah menyatakan berpengaruh positif terhadap belanja daerah di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Susanti Eka Wahyuni, Indrian Supheni (2017) menyatakan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah.

3. Mengetahui *Flypaper Effect* pada Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah

Flypaper effect disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja daerah lebih banyak/lebih boros dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD. Hasil penelitian Susanti Eka Wahyuni dan Indrian Supheni (2017) terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012 - 2016. Pada *website* yang berjudul 2020, Solo Tak Lagi Tergantung Pusat Dan Provinsi. Disini dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Surakarta menargetkan bisa lepas dari ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam hal penganggaran pada tahun 2020 mendatang. Hal ini mengindikasikan bahwa di Pemerintah Kota Surakarta bisa saja terjadi *flypaper effect*.

H₃: Terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah Pemerintah Kota Surakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Surakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Pemerintah Kota Surakarta tahun anggaran 2013 - 2017. Data diperoleh dari situs www.djpk.depkeu.go.id. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji *flypaper effect*.

HASIL PENELITIAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil data mengenai PAD, DAU, dan Belanja Daerah di kota Surakarta tahun 2013 - 2017, maka diperoleh statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	5	298.400.846.632	527.544.224.971	391981296819,60	89160453144,367
X2	5	659.647.382.000	841.536.122.000	750408266400,00	79554716084,944
Y	5	1.375.304.857.300	1.768.345.963.065	1567292548211,40	157278912476,798
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Pada Tabel 1 di atas diketahui dalam lima tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tabel tersebut adalah X_1 menunjukkan bahwa PAD tekecil adalah Rp 298.400.846.632,00 yang merupakan total jumlah PAD kota Surakarta pada tahun 2013. PAD terbesar adalah Rp 527.544.224.971,00 yang merupakan total jumlah PAD kota Surakarta pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Surakarta dapat mengendalikan dana transfer dari pemerintah pusat serta memaksimalkannya untuk dapat meningkatkan pendapatan.

Pada Tabel 1 diketahui dalam lima tahun Dana Alokasi Umum (DAU) dalam tabel tersebut adalah X_2 menunjukkan bahwa DAU tekecil adalah Rp 659.647.382.000,00 yang merupakan total jumlah DAU kota Surakarta pada tahun 2013. Sedangkan DAU terbesar adalah Rp 841.536.122.000,00 yang merupakan total jumlah DAU kota Surakarta pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kota Surakarta tahun 2013 - 2016 semakin dapat memaksimalkan pendapatannya sendiri dengan meningkatkan pajak daerah. Tahun 2017 DAU pemerintah kota Surakarta mengalami penurunan.

Belanja daerah kota Surakarta juga mengalami peningkatan selama 2013 - 2017. Belanja daerah dalam lima tahun ini menunjukkan belanja daerah terkecil (*minimum*) adalah Rp 1.375.304.857.300,00 yang merupakan belanja daerah pada tahun 2013, yaitu periode awal pengamatan penelitian ini. Belanja daerah terbesar (*maximum*) adalah Rp 1.768.345.963.065,00 yang merupakan belanja daerah pada tahun 2017, yaitu periode akhir pengamatan penelitian. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari awal hingga akhir tahun pengamatan. Walaupun nilai belanja daerah kota Surakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya, pemerintah kota Surakarta bisa semakin mandiri, terlihat dari semakin besarnya nilai PAD yang berarti semakin besar juga banyaknya pengeluaran yang dibiayai dengan penghasilan daerahnya sendiri.

2. Uji Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai t	Sig.
Konstanta	504.715.603.029,606	4,612	0,044
PAD (X_1)	1,032	5,039	0,037
DAU (X_2)	0,877	3,817	0,062
F_{hitung}	157,686		0,006
R^2	0,994		
Adjusted R^2	0,987		

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2 di atas dari hasil analisis regresi berganda, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 504.715.603.029,606 + 1,032 X_1 + 0,877 X_2$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai koefisien regresi yang positif. Nilai konstanta sebesar Rp 504.715.603.029,606 artinya apabila nilai PAD dan DAU bernilai nol maka nilai belanja daerah meningkat sebesar Rp 504.715.603.029,606. Variabel PAD memiliki koefisien regresi sebesar 1,032 apabila PAD ditingkatkan sebesar 1%, maka belanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1,032%. Variabel DAU memiliki

koefisien regresi sebesar 0,877 apabila DAU ditingkatkan sebesar 1%, maka belanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,877%.

Hasil analisis uji t dalam penelitian menunjukkan bahwa *p-value* sebesar $0,062 > 0,05$ maka H_0 diterima berarti tidak ada pengaruh signifikan antara DAU terhadap belanja daerah. Dari uji ANOVA atau F test pada tabel didapat *p-value* sebesar $0,006 < 0,05$ maka H_0 ditolak sehingga ada pengaruh secara signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah). Hal ini menunjukkan bahwa besarnya belanja daerah di pengaruhi oleh PAD dan tingkat DAU. Jadi besarnya PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja daerah.

Hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,987 artinya variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 98,7% perubahan naik atau turunnya belanja daerah kota Surakarta dapat dijelaskan oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan sisanya sebesar 1,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibuat dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Hasil dari uji asumsi klasik dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	<i>Tolerance</i> (0,234) > 10% (0,10) dan VIF (4,283) < 10	Tidak ada multikolinearitas
Uji autokorelasi	<i>p-value</i> (1,000) > 0,05	Tidak terjadi autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	<i>p-value</i> (0,468; 0,223) > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji normalitas	<i>p-value</i> (1,000) > 0,05	Model regresi berdistribusi normal

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa uji multikolinearitas masing-masing variabel mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,234 dan nilai VIF sebesar 4,283. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* > 10% (0,10) dan nilai VIF < 10 sehingga tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, maka memenuhi syarat analisis regresi uji autokorelasi diperoleh bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $1,000 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian tidak terjadi autokorelasi antar variabel independen

Uji heteroskedastisitas diperoleh bahwa nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) X1 adalah 0,468, sedangkan untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) X2 adalah 0,223. Hal ini diketahui bahwa masing-masing variabel independen mempunyai *p-value* > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga memenuhi persyaratan dalam analisis regresi.

Uji normalitas hasil perhitungan *Kolmogorov-Smirnov* tersebut, diperoleh bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $1,000 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal.

4. Identifikasi *Flypaper Effect*

Flypaper effect adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja daerah lebih banyak/lebih boros dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD. Untuk menentukan terjadinya *flypaper effect* pada keuangan pemerintah daerah maka harus membandingkan besarnya koefisien PAD dan koefisien DAU.

Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa besarnya nilai koefisien dari PAD sebesar 1,032 dan nilai koefisien DAU sebesar 0,877. Hal ini berarti pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh DAU terhadap belanja daerah. Nilai koefisien pengaruh PAD lebih besar dari nilai koefisien DAU berarti tidak terjadi *flypaper effect* pada keuangan daerah kota di Surakarta pada tahun 2013 – 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kota Surakarta tidak memiliki ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t hitung sebesar 5,039 dengan tingkat signifikan sebesar 0,037. Nilai signifikan untuk variabel PAD menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan 5% (0,05). Nilai signifikan menyatakan bahwa PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dengan demikian H_1 dalam penelitian ini diterima. PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah dalam penelitian ini sangatlah wajar. Hal ini dikarenakan PAD merupakan salah satu sumber utama dalam pemerintah daerah. Semakin besar perolehan PAD pada suatu daerah, maka semakin besar pula jumlah belanja pemerintah daerah tersebut. Pemerintah kota Surakarta terus memperbaiki layanan ataupun fasilitas penerimaan pajak sehingga akan mengoptimalkan PAD. Tahun 2017 pemerintah kota Surakarta terus berupaya dalam peningkatan PAD melalui sistem bayar pajak *online*, yang berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan bukti konkrit bahwa PAD khusus pajak kota Surakarta meningkat melebihi target yang direncanakan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus pajak di kota Surakarta pada 2017 terealisasi Rp 270 miliar, melebihi target awal yaitu Rp 265 miliar. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Rihfenti (2017) dalam penelitiannya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai t hitung sebesar 3,817 dengan signifikan sebesar 0,062. Nilai signifikan untuk variabel DAU menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan 5% (0,05). Nilai signifikan menyatakan bahwa DAU secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dengan demikian H_2 dalam penelitian ini ditolak. Artinya bahwa walaupun DAU menurun namun kebutuhan pemerintah surakarta meningkat hal ini yang menyebabkan DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah.

Dana Alokasi Umum mengalami penurunan di kota Surakarta dan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan dalam RAPBN tahun 2017 yang disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan parlemen, pemerintah mengalokasikan dana transfer ke daerah sebesar Rp 700.026,7 triliun hal ini berarti apabila penerimaan negara turun maka dana alokasi umum akan mengikuti. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan alokasi dalam APBN Perubahan 2016 yaitu Rp 729.720,8 triliun. Tahun 2017 DAU kota Surakarta menurun sekitar Rp 15 miliar namun belanja daerah di kota Surakarta mengalami kenaikan

sekitar Rp 88 miliar serta PAD di kota Surakarta mengalami kenaikan sekitar Rp 102 miliar sehingga PAD bisa menutup belanja daerah kota Surakarta tahun 2017. Dengan demikian walaupun DAU yang ditransfer pemerintah menurun tidak berpengaruh pada kenaikan belanja daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti Eka Wahyuni, Indrian Supheni (2017) yang menyatakan variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

3. Mengetahui *Flypaper Effect* pada Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah

Flypaper effect dapat dikatakan sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja daerah lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri yang diprosikan dengan PAD. Dampak dari terjadinya *flypaper effect* biasanya bersifat negatif yang dapat menyebabkan ketidakmandirian yang terjadi pada suatu daerah atau dengan kata lain pemerintah daerah lebih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk melakukan belanja daerah.

Dampak dari terjadinya *flypaper effect* pada kabupaten/kota yaitu:

- a. Menimbulkan ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan sumber-sumber penghasil pertumbuhan PAD, yaitu seperti peningkatan penerimaan pajak daerah, serta sumber daya alam lainnya.
- b. Menyebabkan unsur ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tetap ada, karena secara langsung pemberian DAU kepada daerah yang berarti pemerintah pusat mensubsidi pengeluaran daerah untuk mengurangi beban pembiayaan, sehingga jika ini terus berlanjut nantinya akan melemahkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri.
- c. Mengakibatkan berkurangnya kemampuan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Menurut Penthury (2011), untuk mengetahui apakah terjadi *flypaper effect* atau tidak di suatu daerah, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Dengan melihat pengaruh dari PAD. Jika PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi *flypaper effect*.
- b. Melihat nilai koefisien dari variabel independen, yaitu DAU dan PAD. Jika nilai koefisien yang dimiliki oleh PAD lebih besar dari nilai koefisien yang dimiliki oleh DAU maka dapat dikatakan tidak terjadi *flypaper effect*. Sedangkan sebaliknya jika nilai koefisien yang dimiliki oleh salah satu yang berasal dari transfer daerah yaitu DAU lebih besar daripada nilai koefisien dari PAD maka dapat dikatakan telah terjadi *flypaper effect*.

Kriteria untuk menentukan terjadi atau tidaknya *flypaper effect* maka peneliti menggunakan pendekatan *flypaper effect* yakni menggunakan perbandingan antara koefisien PAD dan koefisien DAU. Jika koefisien DAU > koefisien PAD maka terjadi *flypaper effect*. Menurut Solopos.com (2018) pemerintah kota Surakarta tahun 2020 menargetkan bisa lepas dari ketergantungan terhadap pusat dan provinsi dalam hal penganggaran. Hal ini yang menjadi dasar mengapa peneliti melakukan penelitian terhadap fenomena *flypaper effect*, akan tetapi setelah diteliti lebih lanjut menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah di kota Surakarta tidak terjadi fenomena *flypaper effect*.

Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa nilai koefisien PAD sebesar 1,032 dan nilai koefisien DAU sebesar 0,877, karena koefisien PAD > koefisien DAU maka tidak terjadi *flypaper effect* pada keuangan pemerintah kota Surakarta pada tahun 2013 - 2017.

Artinya kebijakan belanja daerah di kota Surakarta tahun 2013 - 2017 lebih didominasi oleh PAD dibandingkan dengan DAU. Dengan demikian hipotesis ketiga yang berbunyi terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah Pemerintah Kota Surakarta ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyuni dan Supheni (2017) di mana diperoleh hasil bahwa telah terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012 - 2016 dan juga penelitian Saputri dan Muid (2014) menunjukkan bahwa *flypaper effect* tidak hanya terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah dengan PAD tinggi. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian penelitian sebelumnya Ekawarna (2017) tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah, baik pada kabupaten/kota induk maupun kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Jambi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kota Surakarta, artinya semakin besar perolehan PAD pada suatu daerah, maka semakin besar pula jumlah belanja pemerintah daerah tersebut. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah kota Surakarta, artinya bahwa walaupun DAU menurun namun kebutuhan pemerintah surakarta meningkat hal ini yang menyebabkan DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah. Variabel PAD memiliki nilai koefisien yang lebih besar dibandingkan dengan variabel DAU hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* di pemerintah kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah, Dedy Supriady dan Dadang Solihin. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ekawarna, Shita Unjaswati. 2017. "Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi)". *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol. 4 No. 3 Hal 167-184.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Bogor.
- Maimunah, Mutiara. 2006. "*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra". *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Penthury, Marthen Anton. 2011. *Flypaper Effect Anomaly of West Papua Capital Public Expenditure*. STIA Asy-Syafi'iyah Fakfak Papua Barat.
- Saputri, Marissa Ayudan Dul Muid. 2014. "*Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2012". *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 3 No. 2 Hal 1-11.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Wahyuni, Susanti Eka dan Indrian Supheni. 2017. *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012 - 2016. *Akuntansi Dewantara*. Vol. 1 Hal 188-200.
- <http://www.google.com/amp/s/m.Solopos.com/soloraya/read/20181227/489/961359/2020-solo-tak-lagi-tergantungan-pada-pusat-dan-provinsi-/amp>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2019.